

UNIT ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

I. DAFTAR RENCANA PEMBENTUKAN RPMK DAN/ATAU RKM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020

A. RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

No.	JUDUL	DASAR HUKUM	MAKSUD DAN TUJUAN	SASARAN	POKOK PENGATURAN	PERATURAN TERKAIT	UNIT TERKAIT	ESELON II PENGUSUL	TARGET WAKTU		PERSIAPAN YANG TELAH DILAKUKAN		CARRY OVER PROGRAM PERENCANAAN 2019
									SEMESTER	BULAN	DRAFT RPMK	TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN	
<b>Program Perencanaan</b>													
1	Pengelolaan Dana Desa	UU No. 6 Tahun 2014	- Sebagai dasar formulasi penghitungan besaran Dana Desa per desa - Sebagai dasar penyaluran Dana Desa	- KPPN - Pemerintah - Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Perubahan formulasi pengalokasian dan mekanisme penyaluran Dana Desa	- PP 60 Tahun 2014	- DJPK - DJPB - Kemendagri - Kementerian Desa PDTT - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	II	Desember	Belum	Tidak	Tidak
2	Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Transfer Umum Daerah Yang Tidak Memenuhi Belanja Wajib	- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Mengatur penerapan sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan Belanja Wajib	Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Belanja Wajib	Mengatur mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum serta penyaluran kembalinya atas daerah yang tidak memenuhi ketentuan Belanja Wajib yang meliputi: a. belanja fungsi pendidikan; b. belanja fungsi kesehatan; c. belanja infrastruktur Daerah; dan d. ADD.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus	- DJPK - DJA - Pemda terkait - Kemendagri - Kementerian Desa PDTT - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	I	Februari	Ada	Telah dilakukan pembahasan RPMK	Ya
3	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	- PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan - PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - UUU No 20 tahun 2019 tentang APBN 2020	Revisi PMK 130 untuk: 1. Antisipasi kebijakan DAK Fisik yang cukup dinamis 2. Memberikan penegasan hal dapat menyebabkan salah pemahaman	- K/L teknis pengampu DAK Fisik - Pemerintah daerah	Perbaikan pengaturan terkait persyaratan penyaluran DAK Fisik	PMK 130 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	- DJPK - K/L teknis pengampu DAK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Khusus	II	Oktober	Belum	Telah dilakukan pembahasan awal RPMK	Tidak

No.	JUDUL	DASAR HUKUM	MAKSUD DAN TUJUAN	SASARAN	POKOK PENGATURAN	PERATURAN TERKAIT	UNIT TERKAIT	ESELON II PENGUSUL	TARGET WAKTU		PERSIAPAN YANG TELAH DILAKUKAN		CARRY OVER PROGRAM PERENCANAAN 2019
									SEMESTER	BULAN	DRAFT RPMK	TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN	
4	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah	PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 85 Tahun 2010 pasal 10 Menteri Keuangan Menyelenggarakan SIKD Secara Nasional	- Revisi PMK 74 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SIKD untuk memperkuat landasan hukum pengembangan dan Transformasi SIKD untuk Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah - Memberikan landasan untuk implementasi simplifikasi pelaporan pemerintah daerah secara bertahap - Memenuhi amanah KMK Nomor 302/KMK.01/ 2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan	- Pemerintah Daerah - Unit Di DJPK	- Ketentuan umum data transaksi pemerintah daerah - Sebagai Landasan Penyediaan Data Transaksi melalui SIKD - Pengaturan mengenai proses bisnis pelaksanaan penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah	PMK 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah	- DJPK - CTO - DJPB - DJP	Dit. Evaluasi dan Sistem Informasi	I	Juni	Ada	Telah dilakukan pembahasan RPMK	Tidak
5	Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021	- PP 23/2009 - PP 56/2018 - PP 12/2019	- Menetapkan Maksimal Defisit APBD TA 2021 masing-masing Daerah untuk menjadi pedoman Pemda dalam menetapkan APBD TA 2021 - Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD untuk menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Raperda tentang APBD - Evaluasi yang didasarkan atas pemantauan terhadap Pemda yang mengganggu penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan	Pemda	- Batas maksimal kumulatif defisit APBD - Batas maksimal defisit APBD - Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah - Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD Yang Dibiayai Dari Pinjaman Daerah	- PP 23/2009 - PP 56/2018	- DJPK - BKF - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	II	Agustus	Tidak	Tidak	Tidak

No.	JUDUL	DASAR HUKUM	MAKSUD DAN TUJUAN	SASARAN	POKOK PENGATURAN	PERATURAN TERKAIT	UNIT TERKAIT	ESELON II PENGUSUL	TARGET WAKTU		PERSIAPAN YANG TELAH DILAKUKAN		CARRY OVER PROGRAM PERENCANAAN 2019
									SEMESTER	BULAN	DRAFT RPKM	TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN	
6	Peta Kapasitas Fiskal Daerah	- PP 30/2011 - PP 2/2012	-Fiskal secara berkala yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian atas usulan Pinjaman Daerah yang berasal dari Pemerintah - Menetapkan Peta Kapasitas Fiskal sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan Pemda sebagai penerima hibah - Penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan	Pemda	- Pemantauan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pinjaman daerah - Penggunaan Peta Kapasitas Fiskal Daerah	- PP 56/2018 - PP 2/2012	- DJPK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer	II	Agustus	Tidak	Tidak	Tidak

No.	JUDUL	DASAR HUKUM	MAKSUD DAN TUJUAN	SASARAN	POKOK PENGATURAN	PERATURAN TERKAIT	UNIT TERKAIT	ESELON II PENGUSUL	TARGET WAKTU		PERSIAPAN YANG TELAH DILAKUKAN		CARRY OVER PROGRAM PERENCANAAN 2019
									SEMESTER	BULAN	DRAFT RPMK	TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN	
<b>Kumulatif Terbuka</b>													
1	Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020	Pasal 11 ayat (19) dan ayat (20) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	memberikan dukungan pendanaan DAU tambahan kepada daerah penerima	Pemda yang mendapat alokasi DAU Tambahan	Mengatur mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran DAU tambahan yang meliputi: a. DAU tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; b. DAU tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap; dan c. DAU tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus	- DJPK - Pemda terkait - Kemendagri - Kemenpan RB - KemenDesa - PDPT - BKN - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	I	Januari	Ada	Telah dilakukan pembahasan RPMK	Ya
2	Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020	UU No. 20 Tahun 2019	- Sebagai dasar penetapan besaran/penyaluran transfer DBH CHT ke Daerah  - Untuk memberikan informasi terkait DBH CHT yang menjadi hak Pemerintah Daerah	Mengalokasikan DBH berdasarkan prinsip original dan aktual revenue kepada Pemda	- Alokasi DBH CHT 2020 - Rincian alokasi DBH CHT menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	- UU No. 39 Tahun 2007 - UU No. 20 Tahun 2019 - Perpres 78 Tahun 2019 - PMK No. 139 Tahun 2019	- DJPK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	I	Januari	Tidak	Tidak	Tidak
3	Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2018 menurut Provinsi/Kab/Kota yang dianggarkan dalam APBN 2020	UU No. 20 Tahun 2019	- Sebagai dasar penyaluran kurang bayar DBH ke Daerah  - Untuk memberikan Informasi terkait penyaluran kurang bayar DBH Pemerintah Daerah	Mengalokasikan DBH berdasarkan prinsip original dan aktual revenue kepada Pemda	Rincian sisa Kurang Bayar DBH TA 2018, Penyelesaian sisa Kurang Bayar DBH TA 2018, dan Dasar Penyusunan revisi DIPA DBH	- UU No. 20 Tahun 2019 - Perpres 78 Tahun 2019 - PMK No. 139 Tahun 2019	- DJPK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	I	Maret	Tidak	Tidak	Tidak
4	Perubahan Rincian Dana Bagi hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dalam hal TIDAK ADA APBN-P (TAHAP I)	UU No. 20 Tahun 2019	- Sebagai dasar penetapan perubahan besaran/penyaluran transfer DBH ke Daerah berdasarkan prognosis realisasi tahap I  - Untuk memberikan informasi terkait perubahan DBH yang menjadi hak Pemerintah Daerah	Mengalokasikan DBH berdasarkan prinsip original dan aktual revenue kepada Pemda	Perubahan rincian Dana bagi hasil menurut Provinsi/Kab/Kota	- UU No. 20 Tahun 2019 - Perpres 78 Tahun 2019 - PMK No. 139 Tahun 2019	- DJPK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	II	Juli	Tidak	Tidak	Tidak
5	Perubahan Rincian Dana Bagi hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 berdasarkan prognosis realisasi (TAHAP II)	UU No. 20 Tahun 2019	- Sebagai dasar penetapan perubahan besaran/penyaluran transfer DBH ke Daerah berdasarkan prognosis realisasi tahap II  - Untuk memberikan informasi terkait perubahan DBH yang menjadi hak Pemerintah Daerah	Mengalokasikan DBH berdasarkan prinsip original dan aktual revenue kepada Pemda	Perubahan rincian Dana bagi hasil menurut Provinsi/Kab/Kota	- UU No. 20 Tahun 2019 - Perpres 78 Tahun 2019 - PMK No. 139 Tahun 2019	- DJPK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	II	Oktober	Tidak	Tidak	Tidak

No.	JUDUL	DASAR HUKUM	MAKSUD DAN TUJUAN	SASARAN	POKOK PENGATURAN	PERATURAN TERKAIT	UNIT TERKAIT	ESELON II PENGUSUL	TARGET WAKTU		PERSIAPAN YANG TELAH DILAKUKAN		CARRY OVER PROGRAM PERENCANAAN 2019
									SEMESTER	BULAN	DRAFT RPKM	TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN	
6	Penetapan alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH TA 2019 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	PMK No. 139 Tahun 2019	- Sebagai dasar penetapan alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH TA 2019 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota - Untuk memberikan informasi terkait alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH TA 2019 yang menjadi hak Pemerintah Daerah	Mengalokasikan DBH berdasarkan prinsip original dan aktual revenue kepada Pemda	Penetapan alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH TA 2019 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota	- PMK No. 139 Tahun 2019	- DJPK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	II	Agustus	Tidak	Tidak	Tidak
7	Penetapan Penggunaan DBH DR berdasarkan Kebijakan dalam RUU APBN 2021	RUU APBN Tahun 2021	Penetapan kebijakan penggunaan DBH DR pada Tahun Anggaran 2021	Memberikan informasi terkait penggunaan DBH DR TA 2021 kepada Pemda	Penetapan Kebijakan Penggunaan DBH DR pada TA 2021	- RUU APBN TA 2021 - PP No. 35 Tahun 2002 - PMK No. 139 Tahun 2019	- DJPK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	II	Desember	Tidak	Tidak	Tidak
8	Penetapan Penggunaan DBH CHT berdasarkan Kebijakan dalam RUU APBN 2021	RUU APBN Tahun 2021	- Penetapan kebijakan penggunaan DBH CHT pada Tahun Anggaran 2021	Memberikan informasi terkait penggunaan DBH CHT TA 2021 kepada Pemda	Penetapan Kebijakan Penggunaan DBH CHT pada TA 2021	- RUU APBN TA 2021 - UU No. 39 Tahun 2007 - PMK No. 139 Tahun 2019	- DJPK - Biro Hukum, Kemenkeu	Dit. Dana Transfer Umum	II	Desember	Tidak	Tidak	Tidak

  
 ✱ Astera Primanto Bhakti